



Segera Salurkan Bansos dari APBD

Terutama Mereka yang Tidak Dapat dari Pusat

JOGJA. *Radar Jogja* - Pemprov DIJ akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak PPKM Darurat. Terutama mereka yang tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat. Sumber pendanaan dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021. *► Baca Segera... Hal 3*

BANSOS

Sasaran:

- Masyarakat terdampak PPKM Darurat.
- Terutama yang tidak mendapat bansos dari pemerintah pusat.

Sumber Dana:
Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2021.

Pembahasan:

- Dibahas bersama legislatif melalui usulan rancangan perubahan APBD yang dilaksanakan Agustus-Oktober 2021.
- Pemprov DIJ akan mencantumkan program-program jaring pengaman sosial dalam pembahasan APBD Perubahan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat.

Pemanfaatan:

- Pemanfaatannya akan difokuskan untuk menangani dampak pandemi secara langsung.
- Misalnya untuk pengadaan alat pelindung diri, oksigen, maupun bansos yang menyasar masyarakat terdampak pandemi.

GRAFIK: HENRI KARTUNRADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Sambungan dari hal 1

Namun, penganggarannya perlu dibahas terlebih dahulu bersama legislatif melalui usulan rancangan perubahan APBD yang dilaksanakan Agustus 2021. Sekretaris Daerah (Sekprov) DIJ Kadamanta Baskara Aji mengungkapkan, APBD Perubahan biasanya dibahas tiap bulan September. Karena berada dalam situasi darurat, pembahasannya pun dipercepat. "Sudah dipercepat. Kita sele-

saikan (pembahasan) di bulan Oktober. Berarti dimulainya bulan Agustus," terangnya. Aji memastikan, Pemprov DIJ akan mencantumkan program-program jaring pengaman sosial dalam pembahasan APBD Perubahan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat.

Hingga saat ini bansos bagi warga terdampak baru disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Mereka yang menerima adalah warga yang terdaftar dalam Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Iya, tentu bansos. Terutama mereka yang belum menerima dari pusat," lanjut Aji.

Karena saat ini terjadi lonjakan Covid-19, maka penggunaan APBD perlu direvisi. Pemanfaatannya akan difokuskan untuk menangani dampak pandemi secara langsung. Misalnya untuk pengadaan alat pelindung diri, oksigen, maupun bansos yang menyasar masyarakat terdampak pandemi.

"Perlu ada revisi terhadap alokasi itu. Tetapi alokasi yang

digunakan untuk penanganan Covid-19 langsung bukan dari pertumbuhan ekonomi yang sudah kita laksanakan. Kita inventarisasi warga yang belum dapat bantuan dan itu berhak, nanti dialokasikan di APBD perubahan," tambahnya.

Terkait pemanfaatan dana keistimewaan (danais) untuk penanganan pandemi, hingga saat ini Pemprov DIJ masih menunggu revisi peraturan dari Kementerian Keuangan. Kaitannya apakah danais diperkenankan untuk

membayai di luar lima urusan keistimewaan DIJ.

Jika memang diizinkan, tidak menutup kemungkinan danais

juga bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat. "Kami lakukan beberapa perubahan untuk

danais, tapi realisasinya *kan* tentu harus menunggu perubahan peraturan menteri keuangan," tandas Aji. (kur/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005